

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 177 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 174 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDAWUNG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kedawung Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3 Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18 Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43 Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kedawung yang selanjutnya disebut Puskesmas Kedawung adalah UPTD Puskesmas Kedawung.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home*

care), pelayanan gawat darurat, dan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.

17. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Kesehatan dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada Puskesmas.
- (2) SPM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Kedawung, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan farmasi; dan
- d. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pelayanan kesehatan dasar meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olah raga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (Surveilans).

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas Kedawung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, standar nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas Kedawung, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

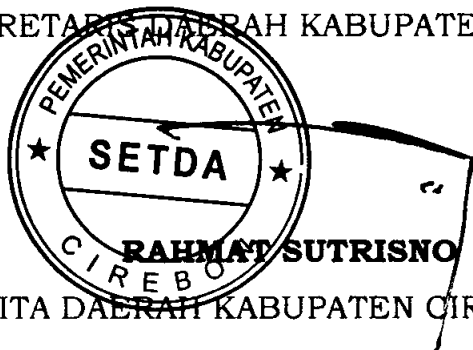
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 177 SERIE

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 174 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS KEDAWUNG**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Gawat Darurat	1. Jam buka pelayanan gawat darurat	7.30 s/d 14.30	7.30 s/d 14.30	7.30 s/d 14.30	7.30 s/d 14.30	7.30 s/d 14.30	7.30 s/d 14.30	7.30 s/d 14.30	Penanggung jawab UKP
		2. Kemampuan menangani <i>Life Saving</i> anak dan dewasa	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat bersertifikat (ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Kelengkapan <i>inform consent</i> sebelum tindakan medis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
2	Pelayanan rawat jalan	1. Jarn buka pelayanan dengan ketentuan	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	Penanggung jawab UKP
		2. Waktu tunggu rawat jalan	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	Penanggung jawab UKP
		3. Pemberi pelayanan rawat jalan	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Dokter dan/atau Perawat pend. mini mal D3	Penanggung jawab UKP
		4. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		5. Pelayanan pemeriksaan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Pelayanan MTBS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		7. Pelayanan Pemeriksaan Lansia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		8. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		9. Pelayanan Kesehatan Keluarga /KIA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		10. Pelayanan KB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		11. Pelayanan Konseling	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pelayanan Farmasi	1. Persentase ketersediaan obat di Puskesmas 2. Penulisan resep sesuai dengan formularium	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP
		3. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	Penanggung jawab UKP
		4. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 20 menit	≤ 20 menit	≤ 20 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Penanggung jawab UKP
		5. Pemberi pelayanan Farmasi	Apoteker & TTK terlatih	Apoteker & TTK terlatih	Apoteker & TTK terlatih	Apoteker & TTK terlatih	Apoteker & TTK terlatih	Apoteker & TTK terlatih	Apoteker & TTK terlatih	Penanggung jawab UKP
		6. Ketersediaan Formularium	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Penanggung jawab UKP

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		7. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP	
4	Pelayanan laboratorium	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 20 menit	≤ 20 menit	≤ 20 menit	≤ 20 menit	≤ 20 menit	≤ 20 menit	≤ 20 menit	Penanggung jawab UKP	
		2. Pemberi pelayanan laboratorium	Analisis pend.mini mal D3	D3	D3	D3	D3	D3	D3	Penanggung jawab UKP	
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKP	
		4. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Penanggung jawab UKP	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Kemampuan Mikroskopis TB Paru	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Tersedia alat dan reagen	Penanggung jawab UKP

BUPATI CIREBON,

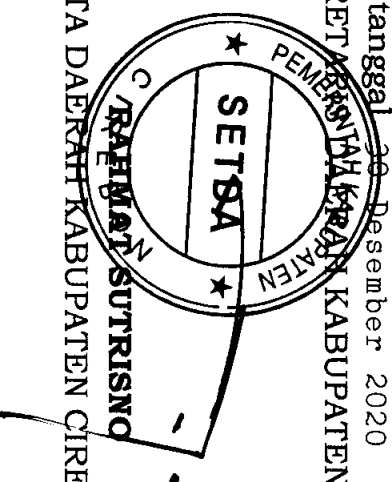
TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 177 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 174 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KEDAWUNG**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar	100 %	103,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	101,4 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %	104,1 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 %	105,1 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	77,2 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	84,6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	26,4 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	81,8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	26,4 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
13	Pelayanan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93 %	100 %	93 %	93 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit									
	1) Pelayanan Penyakit Kusta	a. Angka kesembuhan/RFTT (Release From Treatment) MB	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		b. Angka kesembuhan/RFTT (Release From Treatment) PB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
	2) Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Pencegahan DBD dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3)	Pelayanan Penyakit ISPA	Persentase cakupan penemuan penderita <i>pneumonia</i> balita	86 %	86.35%	65 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Penanggung jawab UKM	
4)	Pelayanan Penyakit Diare	Persentase cakupan pelayanan diare pada kasus semua umur	100 %	75.53 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM	
5)	Pelayanan Penyakit Filariasis	Cakupan tata laksana kasus filariasis	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	
6)	Pelayanan Penyakit Kecacingan	Cakupan tata laksana kasus kecacingan	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	
15	Pelayanan Promosi Kesehatan	a. Pembinaan PHBS ditatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Pembantu,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Polindes, Poskesdes. dll).								
		b. Pemberdayaan Individu/Keluarga melalui Kunjungan rumah	50%	52,41%	50%	50%	50%	50%	50%	Penanggung jawab UKM
		c. Pembinaan PHBS ditatanan rumah tangga	70%	48,49%	70%	70%	70%	70%	70%	Penanggung jawab UKM
		d. Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif	50%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	Penanggung jawab UKM
		e. Cakupan Pembinaan UKBM	40%	100%	40%	40%	40%	40%	40%	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dilihat melalui persentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri (Persentase Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri)								
		f. Advokasi Puskesmas kepada Lintas Sektor	1kali	0	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	Penanggung jawab UKM
		g. Penggalangan Kemitraan	12 keg	0	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	Penanggung jawab UKM
		h. Orientasi Promosi Kesehatan	50%	0	50%	50%	50%	50%	50%	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Promkes) bagi Kader								
		i. Penggunaan Media KIE menyebarluaskan informasi	85%	0	85%	85%	85%	85%	85%	Penanggung jawab UKM
		j. Pendampingan Pelaksanaan SMD dan MMD tentang Kesehatan mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM
16	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a. Persentase Penduduk terhadap akses	58,28 %	76.57%	58,28 %	58,28 %	58,28 %	58,28 %	58,28 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sanitasi yang layak (jamban sehat)								
		b. Jumlah desa yang melaksanakan STBM	40 %	0	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	Penanggung jawab UKM
		c. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih	85 %	62.56%	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Penanggung jawab UKM
		d. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap pasar sehat	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		e. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap TFU (Tempat Fasilitas Umum)	56 %	75.37%	56 %	56 %	56 %	56 %	56 %	Penanggung jawab UKM
		f. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap TPP (Tempat Pengolahan Pangan)	66,34 %	77.17%	66,34 %	66,34 %	66,34 %	66,34 %	66,34 %	Penanggung jawab UKM
17	Pelayanan Gizi	a. Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet	98 %	103,82%	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	50 %	0	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Penanggung jawab UKM
		c. Persentase Bayi <6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	50 %	0	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Penanggung jawab UKM
		d. Persentase Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	50 %	62.84%	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Penanggung jawab UKM
		e. Persentase Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S)	80 %	90.17%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		f. Persentase Balita di timbang yang Naik berat badannya (N/D)	76 %	0	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	Penanggung jawab UKM
		g. Persentase Balita mempunyai buku KIA/KMS	80 %	0	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM
		h. Persentase Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A	90 %	90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Penanggung jawab UKM
		i. Persentase Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	30 %	0	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	Penanggung jawab UKM
		j. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat	95 %	0	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Makanan Tambahan								
		k. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	98 %	101,82%	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	Penanggung jawab UKM
		l. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		m. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan	90 %	0	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Penanggung jawab UKM
18	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	a. Kunjungan Rawat Jalan Umum mendapat Askep Individu	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat Askep keluarga	80 %	0	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM
		c. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		d. Cakupan Keluarga dengan TBC yang mencapai (KM III dan IV) setelah minimal 4 kali kunjungan rumah	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		e. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan Hipertensi yang	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mendapat askep keluarga								
		f. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat askep keluarga	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		g. Cakupan Kelompok Resiko tinggi mendapat Askep	80 %	0	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM
		h. Cakupan masyarakat/Desa mendapat Askep Komunitas	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		i. Persentase kunjungan pasien	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ke Sentra keperawatan aktif									
19	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	a. Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat	80 %	60,81%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM	
		b. Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di SD/ MI	80 %	100%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM	
		c. Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD	80 %	100,23%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM	
		d. Cakupan Penanganan Siswa SD yang Membutuhkan	100 %	38,23%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perawatan Kesehatan Gigi								
20	Pelayanan Kesehatan Kerja	a. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas b. Pendataan Perusahaan (Industri)	100 % 20 %	100% 0		100 % 20 %	100 % 20 %	100 % 20 %	100 % 20 %	Penanggung jawab UKM jawab UKM
21	Pelayanan Kesehatan Olahraga	a. Persentase Jemah haji yang diperiksa kebugaran jasmani b. Persentase pengukuran kebugaran anak sekolah	100 % 100 %	72% 3%		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Penanggung jawab UKM jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Orientasi tes kebugaran bagi guru olahraga	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		d. Jumlah kelompok olahraga	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
22	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	a. Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	13 %	36,67%	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %	Penanggung jawab UKM
		b. Cakupan Penyehat Tradisional Terdaftar/Berizin	80 %	0	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penanggung jawab UKM
		c. Cakupan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat dan Keluarga (TOGA)	100 %	100 %%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Pelayanan Kesehatan Indera	a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi b. Cakupan penanganan katarak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM
24	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya (Surveilans)	a. Cakupan Kelengkapan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit potensial KLB b. Cakupan Ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit potensial KLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit	90 %	100%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Penanggung jawab UKM
		d. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

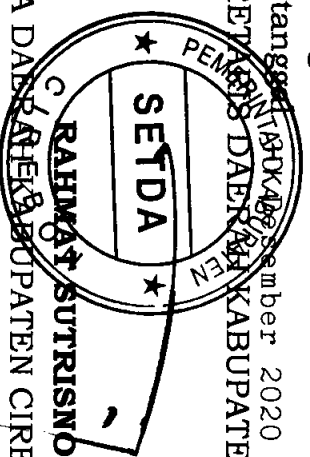
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 13 Oktober 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 177 SERI E

Lampiran III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 174 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

URAIAN INDIKATOR SPM UKP

1. Pelayanan Gawat Darurat

1) Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat

Judul	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat
Dimensi Mutu	Keterjangkauan
Tujuan	Memberikan pelayanan gawat darurat sesuai jam kerja di Puskesmas
Definisi Operasional	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Gawat Darurat selalu siap memberikan pelayanan sesuai jam kerja di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam satu bulan
Denominator	Jumlah hari dalam satu bulan
Sumber Data	Register ruang pelayanan gawat darurat
Standar	Pukul 07.30 s/d 14.30
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan gawat darurat

2) Kemampuan Menangani *Life Saving* Anak Dan Dewasa

Judul	Kemampuan Menangani <i>Life Saving</i> Anak Dan Dewasa
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa oleh Puskesmas
Definisi Operasional	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa adalah pelayanan yang diberikan dengan

	upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan <i>Airway, Breath, Circulation</i>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan <i>life saving</i>
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang membutuhkan penanganan <i>life saving</i>
Sumber Data	Rekam Medik
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan gawat darurat

3) Pemberi Pelayanan Gawat Darurat Bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)

Judul	Pemberi Pelayanan Gawat Darurat Bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Memberikan pelayanan gawat darurat oleh tenaga yang kompeten dalam bidang kegawatdaruratan
Definisi Operasional	Pemberi Pelayanan Gawat Darurat Bersertifikat adalah tenaga pemberi pelayanan gawat darurat yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS yang masih berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS yang masih berlaku
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepegawaian

4) Kelengkapan *Informed Consent* Sebelum Tindakan Medis

Judul	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Sebelum Tindakan Medis
Dimensi Mutu	Keamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan menjaga keamanan pemberi layanan dari tuntutan hukum
Definisi Operasional	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Sebelum Tindakan Medis adalah persetujuan pelanggan untuk menerima tindakan dari petugas puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah <i>Informed Consent</i> lengkap
Denominator	Jumlah pasien yang dilayani di ruang gawat darurat
Sumber Data	Register ruang gawat darurat
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan gawat darurat

2. Pelayanan Rawat Jalan

1) Jam Buka Pelayanan Dengan Ketentuan

Judul	Jam Buka Pelayanan Dengan Ketentuan
Dimensi Mutu	Efisiensi waktu
Tujuan	Memberikan kejelasan kepada pelanggan dalam memberikan pelayanan di unit rawat jalan
Definisi Operasional	Jam Buka Pelayanan Dengan Ketentuan Adalah ketepatan waktu yang digunakan oleh unit rawat jalan dalam memberikan pelayanan sesuai ketentuan Puskesmas yang disepakati
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif jam buka pelayanan rawat jalan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah hari dalam satu bulan

Sumber Data	Survei
Standar	Pukul 08.00 – 12.00
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab UKP

2) Waktu Tunggu Rawat Jalan

Judul	Waktu Tunggu Rawat Jalan
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Memberikan Pelayanan rawat jalan pada hari kerja di Puskesmas yang mudah dan cepat diakses oleh pasien
Definisi Operasional	Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai pasien mendaftar sampai dilayani petugas medis dengan batas waktu tidak lebih dari 20 menit
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien rawat jalan yang dilayani kurang dari 20 menit
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	20 menit
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab UKP

3) Pemberi Pelayanan Rawat Jalan

Judul	Pemberi Pelayanan Rawat Jalan
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis dan keamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan gambaran tentang kompetensi petugas pemberi layanan di setiap unit
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan di rawat jalan adalah petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan

Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang pelayanan rawat jalan
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang pelayanan rawat jalan
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	Dokter dan/atau Perawat pendidikan minimal D3
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepegawaian

4) Kepatuhan *Hand Hygiene*

Judul	Kepatuhan <i>Hand Hygiene</i>
Dimensi Mutu	Keamanan dan keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan yang mendukung keselamatan pelanggan dan efektivitas pelayanan melalui cuci tangan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>hand hygiene</i> adalah kepatuhan petugas terhadap ketentuan cuci tangan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah petugas di ruang pelayanan rawat jalan yang mematuhi ketentuan cuci tangan
Denominator	Jumlah seluruh petugas di tiap ruang pelayanan rawat jalan
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab UKP

5) Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Umum
Dimensi Mutu	Kecepatan dan kenyamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan pelanggan dengan memperhatikan batasan usia pelanggan 5 tahun sampai 59 tahun
Definisi Operasional	Pelayanan Pemeriksaan Umum adalah unit pelayanan yang memberikan kegiatan tindakan

	kuratif dan rehabilitatif kepada pelanggan tanpa spesialistik dengan memperhatikan batasan usia pelanggan 5 tahun sampai 59 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di Pelayanan Pemeriksaan Umum
Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan Pelayanan Pemeriksaan Umum
Sumber Data	Register Pelayanan Pemeriksaan Umum
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab BP Umum

6) Pelayanan MTBS

Judul	Pelayanan MTBS
Dimensi Mutu	Efektivitas dan kenyamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan pelanggan dengan memperhatikan batasan usia 0 sampai 5 tahun
Definisi Operasional	Pelayanan MTBS adalah pelayanan yang diberikan secara komprehensif dan terpadu kepada pelanggan sakit 0 sampai 5 tahun termasuk pemantauan tumbuh kembang anak
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di pelayanan MTBS
Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan pelayanan MTBS
Sumber Data	Register MTBS
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Pelayanan MTBS

7) Pelayanan Pemeriksaan Lansia

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Lansia
Dimensi Mutu	Efektif, efisien dan kenyamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada pelanggan usia lebih dari 59 tahun
Definisi Operasional	Pelayanan Pemeriksaan Lansia adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan usia lebih dari 59 tahun meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium dan pelayanan farmasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di pelayanan pemeriksaan lansia
Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan lansia
Sumber Data	Register pelayanan pemeriksaan lansia
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan pemeriksaan lansia

8) Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
Dimensi Mutu	Efektif, efisien dan kenyamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada pelanggan seluruh golongan umur dengan penyakit gigi mulut dan jaringan penyangga
Definisi Operasional	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan di tempat khusus dengan penyakit gigi dan mulut serta jaringan penyangga
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
Sumber Data	Register Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

9) Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA

Judul	Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA
Dimensi Mutu	Efektif, efisien dan kenyamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan kesehatan kepada Ibu Hamil, Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir dan anak kurang dari 2 bulan sesuai dengan kebutuhan
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA adalah pemberian pelayanan secara menyeluruh kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir dan anak kurang dari 2 bulan meliputi konseling pra nikah, pemeriksaan hamil dan pelayanan imunisasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA
Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA
Sumber Data	Register Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA

10) Pelayanan KB

Judul	Pelayanan KB
Dimensi Mutu	Kenyamanan

Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tujuan untuk merencanakan kehamilan dan kelahiran
Definisi Operasional	Pelayanan KB adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan pasangan usia subur untuk merencanakan kehamilan dan kelahiran
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di pelayanan KB
Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan pelayanan KB
Sumber Data	Register pelayanan KB
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan KB

11) Pelayanan Konseling

Judul	Pelayanan Konseling
Dimensi Mutu	Kepuasan pelanggan
Tujuan	Memberikan pelayanan pengetahuan kepada pelanggan masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Definisi Operasional	Pelayanan Konseling adalah pelayanan edukasi kesehatan kepada pelanggan dengan memberikan informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pelanggan yang dilayani di pelayanan konseling
Denominator	Jumlah keseluruhan pelanggan yang membutuhkan pelayanan konseling
Sumber Data	Register pelayanan konseling
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan konseling

3. Pelayanan Farmasi

1) Persentase Ketersediaan Obat Di Puskesmas

Judul	Persentase Ketersediaan Obat Di Puskesmas
Dimensi Mutu	Efektif dan efisien
Tujuan	Memberikan pelayanan pengobatan dengan kegiatan preventif, kuratif dan rehabilitatif Puskesmas
Definisi Operasional	<p>Ketersediaan Obat Di Puskesmas adalah tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap ketersediaan 20 jenis obat esensial di Puskesmas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Albendazol tab2. Amoxicillin 500 mg tab3. Amoxicillin syrup4. Dexamatason tab5. Diazepam injeksi 5 mg/l6. Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1%7. Fitomenadion (vitamin K) injeksi8. Furosemid tablet 40 mg/ hidroklorotiazid9. Garam Oralit10. Glibenklamid/ Metformin11. Kaptopril tab12. Magnesium Sulfat injeksi 20 %13. Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 mg14. OAT dewasa15. Oksitosin injeksi16. Parasetamol 500 mg tab17. Tablet tambah darah18. Vaksin BCG19. Vaksin DPT/DPT-HB/DPT-HB-HIB20. Vaksin TD
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali

Numerator	Jumlah jenis obat indikator yang tersedia di Puskesmas
Denominator	Jumlah keseluruhan jenis obat indikator yang tersedia di Puskesmas
Sumber Data	Ruang pelayanan farmasi
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab farmasi

2) Penulisan Resep Sesuai Dengan Formularium

Judul	Penulisan Resep Sesuai Dengan Formularium
Dimensi Mutu	Keamanan dan kepuasan pelanggan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan mendukung kegiatan preventif, kuratif dan rehabilitatif Puskesmas sesuai dengan standar
Definisi Operasional	Penulisan Resep Sesuai Dengan Formularium adalah persentase kesesuaian jenis obat yang tersedia dengan Fornas (Formularium Nasional) FKTP
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah resep obat yang sesuai dengan formularium nasional
Denominator	Jumlah seluruh resep obat
Sumber Data	Ruang pelayanan farmasi
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab farmasi

3) Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi
Dimensi Mutu	Efektivitas, kesinambungan pelayanan, dan efisiensi
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya kecepatan pelayanan obat

Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 5 menit
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab farmasi

4) Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat racikan
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat-obatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 20 menit
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab farmasi

5) Pemberi Pelayanan Farmasi

Judul	Pemberi Pelayanan Farmasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas

Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan obat adalah Apoteker dan TTK terlatih yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	Apoteker dan TTK terlatih
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepegawaian

6) Ketersediaan Formularium

Judul	Ketersediaan Formularium
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas sesuai dengan formularium nasional
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Dokumen formularium
Denominator	1
Sumber Data	Survei
Standar	Tersedia
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab farmasi

7) Tidak Adanya Kejadian Salah Pemberian Obat

Judul	Tidak Adanya Kejadian Salah Pemberian Obat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kenyamanan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya tidak adanya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
Definisi Operasional	Tidak Adanya Kejadian Salah Pemberian Obat adalah tidak adanya kesalahan pemberian obat, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Salah dalam memberikan jenis obat2. Salah dalam memberikan dosis3. Salah orang4. Salah jumlah
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien di ruang Farmasi yang disurvei dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat
Denominator	Jumlah seluruh pasien di ruang Farmasi yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab farmasi

4. Pelayanan Laboratorium

1) Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium

Judul	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan

Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang di survei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 20 menit
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Laboratorium

2) Pemberi Pelayanan Laboratorium

Judul	Pemberi Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan laboratorium adalah analis yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang laboratorium yang mempunyai kompetensi sesuai standar
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang laboratorium yang mempunyai kompetensi sesuai standar
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	Analisis pendidikan minimal D3
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepegawaian

3) Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Judul	Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan administrasi dalam pelayanan laboratorium meliputi kesalahan identifikasi, kesalahan registrasi, kesalahan pelabelan sampel, dan kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah pasien yang diperiksa tanpa kesalahan administrasi dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Laboratorium

4) Kemampuan Memeriksa HIV-AIDS

Judul	Kemampuan Memeriksa HIV-AIDS
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa HIV-AIDS
Definisi Operasional	Pemeriksaan HIV-AIDS adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penderita HIV-AIDS
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Tersedianya alat dan reagen untuk pemeriksaan HIV-AIDS
Denominator	Seluruh alat dan reagen yang seharusnya ada

	untuk pemeriksaan HIV-AIDS
Sumber Data	Inventaris ruang laboratorium
Standar	Tersedia alat dan reagen
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Sarpras

5) Kemampuan Mikroskopis TB Paru

Judul	Kemampuan Mikroskopis TB Paru
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa mikroskopis <i>tuberculosis</i> paru
Definisi Operasional	Pemeriksaan mikroskopis <i>tuberculosis</i> paru adalah pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi adanya <i>mycobacterium tuberculosis</i> pada sediaan dahak pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Tersedianya alat dan reagen untuk pemeriksaan Mikroskopis TB Paru
Denominator	Seluruh alat dan reagen yang seharusnya ada untuk pemeriksaan Mikroskopis TB Paru
Sumber Data	Inventaris ruang laboratorium
Standar	Tersedia alat dan reagen
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung jawab Sarpras

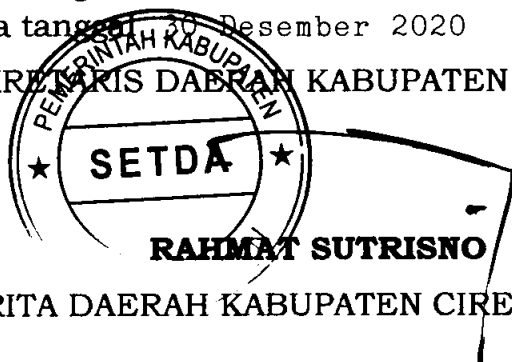
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 177 SERI E

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 174 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

URAIAN INDIKATOR SPM UKM**1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kuantitas, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Satu kali pada trimester pertamab. Satu kali pada trimester keduac. Dua kali pada trimester ketiga2. Standar kualitas, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Pengukuran berat badanb. Pengukuran tekanan darahc. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasig. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tableth. Tes Laboratoriumi. Tata laksana/penanganan kasusj. Temu wicara (konseling)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Ibu
Target	100%

Langkah Kegiatan	Pendapatan bumil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, MONEV dan PWS
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mencegah AKI dan AKB dari proses kehamilan dan persalinan
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu bersalin untuk mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persalinan normal, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (1) Dokter dan bidan, atau (2) 2 orang bidan, atau (3) Bidan dan perawat 2) Persalinan komplikasi Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Ibu dan Kohort Bayi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelayanan persalinan, perawatan nifas, monitoring dan evaluasi serta PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mencegah kematian neonatus dan kecacatan bayi baru lahir

Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar kuantitas Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari 2) Standar kualitas, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam), yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 3) Injeksi vitamin K1 4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik 5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin) 6) Hepatitis B0 b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM 3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1 4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan 5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Bayi dan SIRS
Target	100%

Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi, MTBS, SDIDTK kunjungan bayi dalam dan luar gedung, rujukan audit kematian dan kesakitan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Memberikan pelayanan dengan menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap balita berusia 0-59 bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan balita sehat Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang b. Pelayanan kesehatan balita sakit Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3
Denominator	Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Kohort Balita, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK) pelayanan kunjungan balita dan pra sekolah di dalam maupun di luar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap anak pada usia pendidikan dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi : 1) Skrining kesehatan 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan Skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjangkaran anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjangkaran, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Pelaksana program UKS

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap warga negara usia 15-59 tahun untuk mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Definisi operasional	Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59

	tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 15–59 tahun di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber Data	Pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan Posbindu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana program PTM

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap warga negara usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap warga negara usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar, yang meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan

Numerator	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Pelaporan dan pencatatan kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan Lansia, skrining kesehatan Lansia, pemberian buku kesehatan Lansia, pelayanan rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Pelaksana program Usia Lanjut

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap penderita Hipertensi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat 3) Melakukan rujukan jika diperlukan <p>Keterangan: Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi</p>
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita hipertensi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana program PTM

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap penderita DM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi 3) Melakukan rujukan jika diperlukan <p>Keterangan: Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi</p>
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjan berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita Diabetes Melitus
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan

	rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana program PTM

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap penderita ODGJ berat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah pelayanan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa berat bagi psikotik akut dan Skizofrenia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi : 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa , antara lain : a) Pemeriksaan status mental b) Wawancara 2) Edukasi kepatuhan minum obat 3) Melakukan rujukan jika diperlukan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa, Pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Kesehatan Jiwa

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Judul	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap orang terduga Tuberkulosis untuk mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar

Definisi Operasional	<p>Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC 2) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 5) Melakukan rujukan jika diperlukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, Penyediaan KIE TB, Pelayanan dan Pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, Jejaring kemitraan pelayanan TB, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Program TB

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) untuk mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar

Definisi Operasioonal	<p>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining <p>Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual) 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan

Numerator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kunjungan HIV
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemetaan kelompok sasaran, penyediaan SDM, Penyuluhan, Jejaring dan Kemitraan, pemeriksaan HIV, Rujukan kasus HIV, Pencatatan dan pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab Pengumpul data	Pelaksana program HIV

13. Pelayanan Imunisasi

Judul	Pelayanan Imunisasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Pelayanan Imunisasi adalah pelaksanaan vaksinasi kepada sasaran untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit PD3I dengan pelayanan sesuai standar meliputi : a. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) b. Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunizatin</i> (UCI)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang telah diberikan vaksinasi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah sasaran yang vaksinasi yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Imunisasi

14. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

1) Pelayanan Penyakit Kusta

Judul	Pelayanan Penyakit Kusta
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektifitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus Kusta oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Kusta adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita Kusta untuk mendapatkan pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi : a. Angka kesembuhan/RFT (Release From Treatment) MB b. Angka kesembuhan/RFT (Release From Treatment) PB
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita Kusta yang dilayani dalam pada kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan penderita Kusta yang dilayani dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pengobatan Penderita Kusta
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Pelaksana Program Kusta

2) Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Judul	Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Dimensi Mutu	Keselamatan, efektif dan efisien
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui persentase rumah dan tempat yang bebas jentik dalam upaya pencegahan penyakit DBD
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita DBD dengan cara Pencegahan DBD dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik dalam waktu tertentu
Denominator	Jumlah rumah dan tempat tempat umum yang diperiksa jentik dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan PJB dan PSN

Standar	95%
Penanggung jawab pengumpulan data	Pelaksana program DBD

3) Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Judul	Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui besaran penemuan balita pneumonia oleh petugas Puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita ISPA dengan tatalaksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah estimasi penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program ISPA
Standar	86%
Penanggung jawab pengumpulan data	Pelaksana program ISPA

4) Pelayanan Penyakit Diare

Judul	Pelayanan Penyakit Diare
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus diare oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Diare adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita diare dengan tata laksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita diare semua umur yang dilayani dalam pada kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan penderita diare semua umur dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program diare

Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Pelaksana program diare

5) Pelayanan Penyakit Filariasis

Judul	Pelayanan Penyakit Filariasis
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus Filariasis oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Filariasis adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita Filariasis dengan tata laksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita Filariasis yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan Filariasis yang dilayani dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program Filariasis
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Pelaksana program Filariasis

6) Pelayanan Penyakit Kecacingan

Judul	Pelayanan Penyakit Kecacingan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus Kecacingan oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Kecacingan adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita Kecacingan dengan tata laksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita Kecacingan yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan penderita Kecacingan yang dilayani dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program Kecacingan
Standar	100%

Penanggung jawab pengumpulan data	Pelaksana program Kecacingan
-----------------------------------	------------------------------

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pelayanan Promosi Kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Promosi Kesehatan adalah pemberian informasi oleh petugas kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, dll). b. Pemberdayaan Individu/Keluarga melalui Kunjungan rumah c. Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga d. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif e. Pembinaan UKBM dilihat melalui presentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri (Prosentase Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri) f. Advokasi Puskesmas kepada Lintas Sektor g. Penggalangan Kemitraan h. Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi Kader i. Penggunaan Media KIE menyebarluaskan informasi) j. Pendampingan Pelaksanaan SMD dan MMD tentang Kesehatan mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas dalam dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan

Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Penyuluhan dan Pembinaan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Promosi Kesehatan

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan agar seluruh penduduk mendapat akses air bersih dan jamban sehat
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pembinaan dan pemecuan santasi kepada sasaran tentang kesehatan lingkungan sesuai standar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat) b. Jumlah desa yang melaksanakan STBM c. Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih d. Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap pasar sehat e. Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap TFU (Tempat Fasilitas Umum) f. Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap TPP (Tempat Pengolahan Pangan)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemecuan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan KIE, pembinaan, pemecuan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Kesling

17. Pelayanan Gizi

Judul	Pelayanan Gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi.

Definisi Operasional	<p>Pelayanan Gizi adalah pelayanan gizi melalui konseling, penyuluhan, pembinaan dan pemantauan sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet b. Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) c. Bayi <6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif d. Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif e. Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S) f. Balita di timbang yang Naik berat badannya (N/D) g. Balita mempunyai buku KIA/KMS h. Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitaim A i. Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) j. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan k. Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A l. Kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan m. Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan program Gizi, KMS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Memberikan konseling, penimbangan, pemberian PMT penyuluhan dan pemulihan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Gizi

18. Pelayanan Keperawatan Masyarakat

Judul	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian

Tujuan	Memberikan pelayanan untuk peningkatan kemandirian sasaran dalam mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki.
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka meningkatkan kemandirian kesehatan yang sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kunjungan rawat jalan umum mendapat Askep individu b. Keluarga resiko tinggi mendapat Askep keluarga c. Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus d. Keluarga dengan TBC yang mencapai (KM III dan IV) setelah minimal 4 kali kunjungan rumah e. Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan Hipertensi yang mendapat Askep keluarga f. Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat Askep keluarga g. Kelompok Resiko tinggi mendapat Askep h. Masyarakat/Desa mendapat Askep Komunitas i. Kunjungan pasien ke Sentra keperawatan aktif
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Perkesmas, Registrasi kunjungan rawat jalan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi sasaran, pembinaan, kunjungan rumah, penyuluhan, memberikan asuhan keperawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Perkesmas

19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Judul	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Memberikan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan sesuai standar, melalui pembinaan kesehatan gigi di masyarakat, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat b. Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di SD/ MI c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD d. Penanganan Siswa SD yang Membutuhkan Perawatan Kesehatan Gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan pelayanan Gigi
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pelayanan dan Pemeriksaan gigi, rujukan kasus gigi, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Gigi

20. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Pelayanan Kesehatan Kerja
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kepada setiap pekerja untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan kerja adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan pekerja melalui pos UKK kerja sesuai standar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas b. Pendataan Perusahaan (Industri)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah pekerja yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan kesehatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh pekerja yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan UKK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pelayanan dan Pemeriksaan kesehatan, rujukan kasus, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program UKK

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pelayanan Kesehatan Olahraga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Olahraga
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Olahraga adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan olahraga sesuai standar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani b. Pengukuran kebugaran anak sekolah c. Orientasi tes kebugaran bagi guru olahraga d. Pendataan jumlah kelompok olah raga
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan olahraga sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pembinaan dan pengukuran kebugaran, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Kesehatan Olahraga

22. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Judul	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang berkompeten
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah pembinaan dan pemantauan kelompok penyehat tradisional sesuai standar, melalui : a. Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional b. Penyehat Tradisional Terdaftar/Berizin c. Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat dan Keluarga (TOGA)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah kelompok TOGA dan Penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA dan penyehat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Program Kesehatan Tradisional
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pembinaan dan pemantauan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Kesehatan Tradisional

23. Pelayanan Kesehatan Indera

Judul	Pelayanan Kesehatan Indera
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Indera.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan indera adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan indera sesuai standar, meliputi : a. Penanganan kasus kelainan refraksi b. Penanganan katarak

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan indera sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran pelayanan indera yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Indera
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, pemantauan, penanganan dan rujukan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Indera

24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya (Surveilans)

Judul	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya (Surveilans)
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan tentang kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB
Definisi Operasional	Pelayanan Surveilans adalah sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit potensial KLB b. Ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit potensial KLB c. Kelengkapan surveilans terpadu penyakit d. Ketepatan surveilans terpadu penyakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah kasus potensi KLB yang ditangani sesuai standar di wilayah dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh kasus potensi KLB yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan W2, laporan STP
Target	100%

Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Program Surveilans

BUPATI CIREBON,

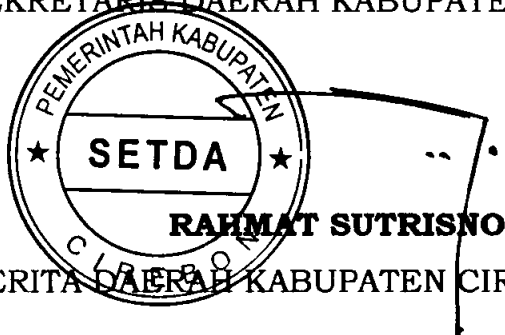
TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 177SERIE